



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 1996 SERI D NO.SERI 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DATI II
HULU SUNGAI SELATAN

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum
Peraturan Daerah T.A. 1996/1997

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 1996 SERI D NO. SERI 4
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepariwisataan Daerah yang berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata yang ada sebagai upaya pembinaan dan penyempurnaan yang lebih terarah dan terpadu ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 10 Maret 1992 Nomor 94/SK-1/KUM dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor 3 Tahun 1992 pada tanggal 23 Maret 1994 Seri D Nomor Seri 3 sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu ditinjau dan ditetapkan kembali ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan kembali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah .
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang Kepariwisataan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Seksi Sarana Pariwisata ;
 - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Dinas Pariwisata

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga ;
- b. melakukan urusan perencanaan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan urusan keuangan ;
- d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Perencanaan ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga dan kepegawaian Dinas.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimatisasikan rencana kegiatan Dinas.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan peman-
tauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 13

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
- c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan obyek wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata.
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan serta menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Paragraf 3

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 15

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana serta tenaga kerja pariwisata ;
- b. menyiapkan perizinan di bidang pengusaha akomodasi, rumah makan dan bar dan ketenagakerjaan ;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi ;
- b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
- c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Akomodasi orang mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan rumah makan dan bar.
- (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

Paragraf 4

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Pasal 19

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran dan penyuluhan wisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- b. memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan evaluasi kegiatan.

Pasal 21

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi ;
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
- c. Sub Seksi Bimbinag Wisata.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang ditetapkan kemudian.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VI

PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 16 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK II HULU SUNGAI SELATAN

Ketua,

Cap.

ttd.

S O E D A R N O

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

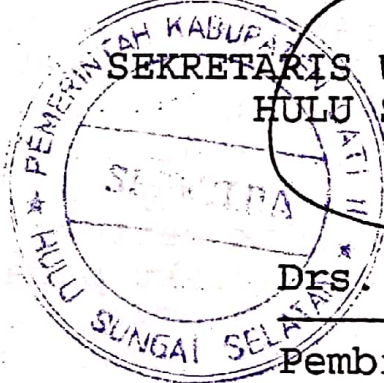
Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor : 20 Tahun 1996
Tanggal : 16 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan

Nomor : 7
Pada tanggal : 2 Desember 1996
Tahun : 1996
Seri : D
No. Seri : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. M. ARSYAD

Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 675

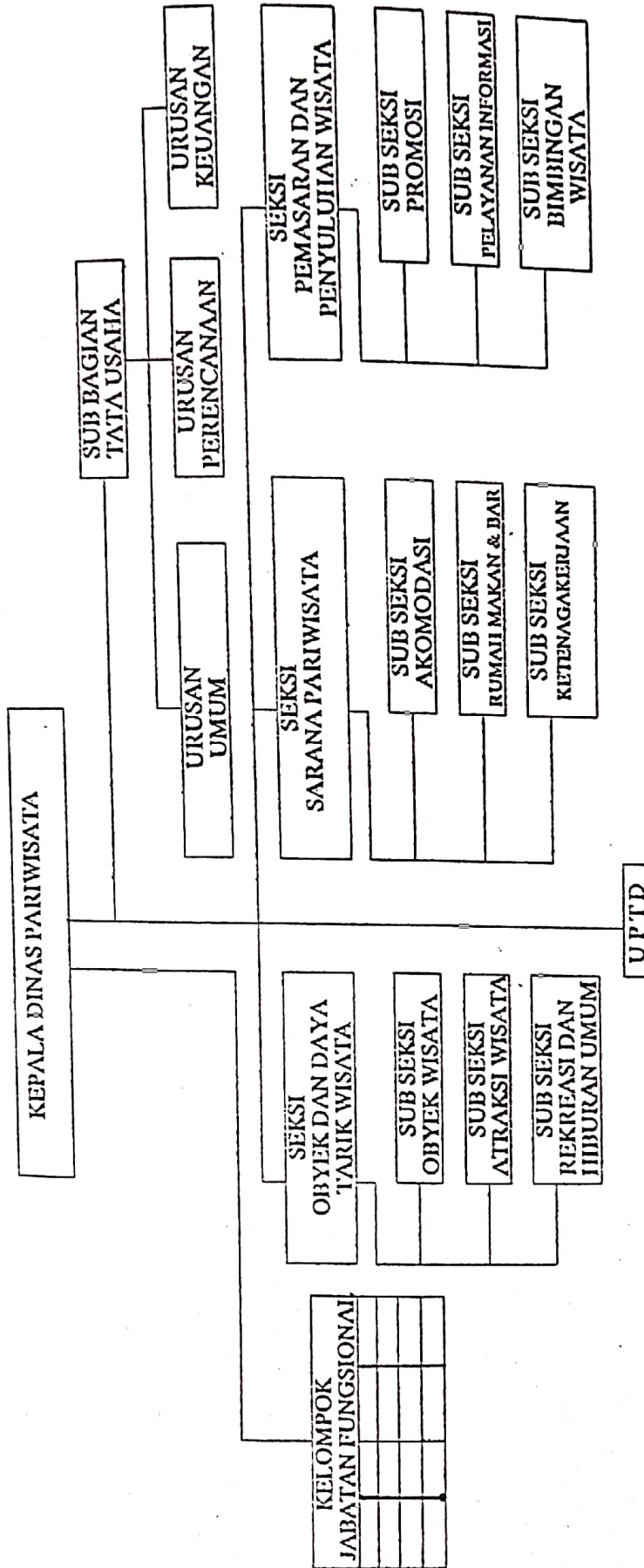
Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINU FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Nomor : 7 Tahun
Tanggal : 16 Nopember
1995
1995



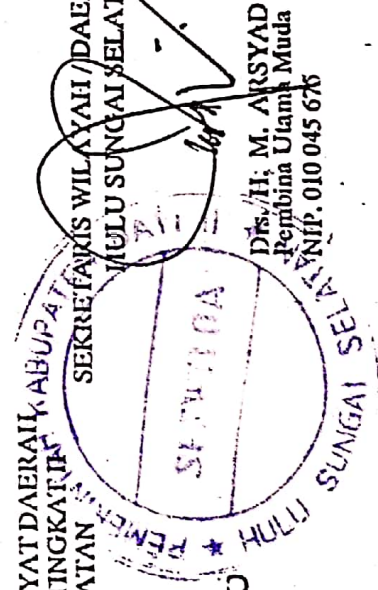
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Ketua,

Cap. SOEDARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd

Drs. H. SAIDUL HUJARIE



Drs. H. M. ARSYAD
Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 676